

**BAB III**  
**PROSES DIPLOMASI KEBIJAKAN POLITIK WAKIL**  
**PRESIDEN (1945 – 1949)**

Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah asing dan organisasi antar pemerintah melalui cara-cara non-kekerasan seperti dialog dan negosiasi. Diplomasi umumnya mengacu pada urusan internasional yang dilakukan oleh diplomat profesional, dengan mempertimbangkan berbagai isu dan topik yang dibahas oleh kedua belah pihak. Praktisi disebut diplomat. Diplomasi sering dianggap sebagai cara untuk mendapatkan keunggulan dalam bahasa yang lembut. Perjanjian internasional biasanya dinegosiasikan oleh diplomat dan kemudian diratifikasi oleh pejabat senior negara. Pada tahun 1796, Edward Burke memperkenalkan kata diplomasi ke dalam bahasa Inggris berdasarkan diplomat Prancis.

**A. Latar Belakang Diplomasi**

Diplomat adalah orang yang ditunjuk oleh organisasi nasional atau antar pemerintah (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa) untuk melakukan diplomasi dengan satu atau lebih negara atau organisasi internasional. Diplomat Indonesia bekerja di bawah pengawasan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Fungsi utama seorang diplomat adalah bertindak sebagai utusan, perwakilan dan pembela kepentingannya sendiri di negara tuan rumah. Memulai dan mempromosikan kesepakatan strategis. Setuju dan diperintahkan untuk bernegosiasi dan merundingkan kesepakatan; mengiklankan negara Anda. Pelaksanaan hubungan perdagangan, teknik dan ekonomi antar negara. Membangun dan mengamankan persahabatan yang baik antara negara asal dan negara penyimpanan. Duta besar adalah salah satu pos diplomatik terbaik.

**Tugas pokok diplomasi**

- Pelaksanaan komponen-komponen negara.
- Melindungi kepentingan negara dan rakyatnya.
- Menyediakan negara dengan maklumat, bahan maklumat dan laporan tentang peristiwa penting dunia.

### **Sifat dan tujuan diplomasi**

Diplomasi adalah instrumen utama kebijakan luar negeri, tetapi bukan satu-satunya cara bagi para pemimpin politik untuk mencapai tujuan diplomatik mereka. Inti dari diplomasi adalah kebalikan dari represi militer, yang juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan eksternal pemerintah. Diplomasi adalah kekuatan nasional yang mencakup yang mencapai konsensus damai dengan meratakan perbedaan antar negara atau antar pihak. Instrumen utama diplomasi adalah dialog dan negosiasi, terutama dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi diplomatik (perwakilan) dan pemimpin politik lainnya.

Diplomat adalah seorang guru atau ahli diplomatik yang menyampaikan pesan, merundingkan koordinasi relasional, dan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Secara umum, operasi diplomatik ini bersifat rahasia dan tidak semuanya dipublikasikan. Secara umum, hasil diplomasi baru akan diumumkan kepada publik jika tercapai kesepakatan. Politik luar negeri bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional dalam hal geografi, sejarah, ekonomi, dan pertahanan. Kemandirian, keamanan, dan pelestarian keutuhan bangsa (wilayah, politik, ekonomi, moral) merupakan kewajiban utama negara. Selanjutnya, bertujuan untuk melestarikan berbagai kebebasan bertindak bangsa.

Para pemimpin politik secara tradisional berasal dari negara berdaulat untuk mengembangkan kebijakan luar negeri, mengejar kepentingan nasional, dan menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi eksternal dan perubahan teknologi. Diplomasi kemudian digunakan untuk memperkuat suatu negara, negara, atau organisasi terhadap pihak luar untuk memajukan kepentingan internal lembaga tersebut. Kegiatan diplomatik selalu ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan kelompok dan mencegah munculnya kebencian tanpa risiko dan biaya kekerasan. Namun, sangat mungkin bahwa diplomasi menimbulkan ancaman ekonomi, proses, atau protes dan menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian perselisihan sepihak. Perang dimungkinkan jika diplomasi gagal, tetapi diplomasi berguna bahkan selama perang. Dalam jangka panjang, diplomasi bertujuan untuk membangun tatanan internasional yang bermanfaat, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan meningkatkan kerjasama antar negara.

## Sejarah Diplomasi

Di Eropa abad pertengahan akhir, gagasan bahwa diplomat adalah malaikat atau utusan dari surga ke bumi mungkin tampak aneh, tetapi beberapa elemen diplomasi sudah ada sebelum catatan sejarah. Diplomat atau utusan dianggap suci. Mereka biasanya memakai banyak simbol, seperti staf kedutaan, dan diterima dengan upacara yang rumit. Wanita sering digunakan sebagai pembawa pesan kesucian misterius dan "permainan seks". Budaya kuno percaya bahwa perempuan sering diberi tugas yang sangat penting untuk merundingkan perdamaian. Diplomasi dalam peradaban manusia purba diyakini telah dilakukan melalui prasasti yang ditemukan oleh para sejarawan. Pengetahuan terbesar tentang diplomasi awal berasal dari budaya Timur Tengah, Mediterania, Cina, dan India. Sejarawan menemukan catatan perjanjian antara negara-kota Mesopotamia sekitar 2850 SM.

Itu berarti peradaban di sana mempraktikkan diplomasi berabad-abad yang lalu. Di sisi lain, Akkadia (Babilonia) menjadi bahasa diplomatik pertama dan bahasa internasional Timur Tengah sampai digantikan oleh bahasa Aram. Akkadia adalah bahasa Semit yang digunakan di Mesopotamia kuno, khususnya Asyur dan Babilonia. Aram adalah bahasa Semit berusia 3.000 tahun yang digunakan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Bahasa Aram pernah menjadi bahasa resmi kerajaan dan bahasa upacara keagamaan. Dokumen diplomatik antara istana Mesir dan raja-raja Het abad ke-14 SM. dapat ditemukan di pil kuku Akkadia. Kontrak tertua dalam teks lengkap berasal dari sekitar 1280 SM. dan merupakan hasil diplomasi antara Ramses II dari Mesir dan para pemimpin Het. Bukti signifikan dari diplomasi Asyur abad ke-7, khususnya dalam Alkitab, menetapkan hubungan antara suku-suku Yahudi dan non-Yahudi.

Pada bulan Agustus, pemerintah Belanda melakukan upaya lain untuk memecahkan penghalang dengan datang ke Jawa dan menunjuk tiga anggota Komite Umum untuk membantu Van Mook dalam negosiasi baru dengan perwakilan Republik. Pertemuan antara kedua negara diadakan pada bulan Oktober dan November di bawah kepemimpinan netral Sir Killearn, Komisaris Khusus Inggris. Terletak di bukit Lingal Jati dekat Cirebon. Setelah mengalami stres

Dari luar negeri dicapai kesepakatan pada tanggal 15 November 1946, dengan pokok-pokok sebagai berikut.

1. Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto, yang wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Belanda memiliki waktu hingga 1 Januari 1949 untuk meninggalkan wilayah de facto.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atas nama Negara Republik Indonesia Amerika Serikat yang akan menjadi Republik Indonesia.
3. Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda akan membentuk Aliansi Indonesia-Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai Ketua.

Untuk tujuan ini, Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Majelis Konstituante didirikan, terdiri dari perwakilan yang dipilih secara demokratis dan konstituen lainnya. Indonesia Serikat kemudian menjadi bagian dari aliansi Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curaçao. Ini akan mempromosikan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, dan urusan ekonomi dan budaya. Indonesia United akan mengajukan keanggotaan di PBB. Akhirnya, setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase.

Kedua utusan itu kembali ke Jakarta, dan dua hari kemudian, Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman, yakni pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, perundingan Linggarjati resmi berakhir. Faktanya, Sukarno yang menjadi kekuatan yang memungkinkan kesepakatan itu, namun Sjahrir-lah yang diidentifikasi sebagai bagian dari rancangan itu, dan siapa yang bertanggung jawab, jika ada yang tidak beres.



Gambar 1. Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947

Sumber : Panji Rajat 21 September 1948

Di Malang pada bulan Februari dan Maret 1947, SM Kartosuwiryo diangkat sebagai salah satu dari lima anggota Panitia Pelaksana Masyumi, yang terdiri dari 47 orang anggota yang menghadiri rapat KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada bulan November 1946, keberangkatan SM Kartosoewirjo dikawal oleh seorang pejuang Hizbora dari Jawa Barat, dengan atau tanpa persetujuan pemerintah Republik dan Belanda. Partai Islam Nasional (diwakili oleh Partai Masyumi dan PNI). Kaum sosialis ingin KNIP menyetujui naskah Linggadjati, tetapi Masyumi dan PNI cenderung menolaknya.

Dokter. H.J. van Mook, Kepala Kantor Urusan Sipil Hindia Belanda (NICA), yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Hindia Belanda, bersikeras pada pemisahan Indonesia, yang hanya mencakup tiga pulau. Bahkan sebelum teks itu ditandatangani pada 25 Maret 1947, Konferensi Denpasar 18-24 Desember 1946 digunakan untuk memaksa pembentukan Indonesia Timur, dengan Teukurda Gedi Raka Sukwati sebagai presiden. Hasil Perjanjian Linggadjati ditandatangani di Batavia pada tanggal 25 Maret 1947. Partai Masyumi menentang hasil kesepakatan tersebut. Inilah banyak elemen perjuangan Republik Indonesia, yang gagal menerima pemerintah Belanda sebagai penguasa yang berdaulat di seluruh Indonesia. Karena seringnya terjadi kekacauan, sebenarnya sangat sulit untuk mencapai kesepakatan. Selama perang, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1947 atas permintaan Australia dan India, dan tidak lama kemudian membentuk komite niat baik yang terdiri dari perwakilan dari Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Mediasi perselisihan.

## **B. Proses Diplomasi**

Pada tanggal 17 Januari 1948, sebuah pertemuan di atas kapal USS Renville menghasilkan kesepakatan lain yang diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Perdamaian muncul di tengah persiapan untuk pembentukan zona demiliterisasi Belanda, sebagai referendum diadakan untuk memutuskan apakah kelompok pulau besar yang berbeda ingin berpartisipasi, tetapi tidak seperti perjanjian Linggajati. Bagian federal dari republik atau rencana kedaulatan Belanda akan tetap berada di Indonesia sampai diserahkan kepada Indonesia.

Pada tanggal 19 Januari, Perjanjian Rennesville ditandatangani untuk wilayah republik selama masa transisi sampai tercapai penyelesaian akhir, bahkan lebih terbatas daripada Perjanjian Linggarjati: hanya mencakup sebagian

kecil Jawa Tengah (Yogyakarta dan delapan kabupaten pemukiman) dan Jawa Barat . ujung jawa. Kepulauan Banten, tetapi akan mengadakan referendum republik. Untuk menentukan masa depan wilayah Belanda yang baru diperoleh melalui operasi militer. Perdana Menteri Belanda menjelaskan alasan penandatanganan perjanjian agar tidak "menghasut Belanda untuk membenci Amerika Serikat".

Dalam arti, ini adalah pengulangan dari apa yang terjadi selama dan setelah negosiasi Linggarjati. Misalnya, melalui Perjanjian Linggarjati dan perundingan Renville, Sukarno dan Hatta telah menjadi simbol kemerdekaan Indonesia dan penyatuan Yogyakarta, memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dan jantung republik terus berdetak. Ini juga merupakan keuntungan besar, dan setelah persetujuan Linggarjati, orang lain yang jauh dari pusat (mantan Perdana Menteri Chariel, kalau-kalau ada yang tidak beres atau dianggap bertanggung jawab langsung. Sekarang Perdana Menteri Amir) juga telah diidentifikasi kembali . Itu dianggap salah.

Dari agresi militer pertama hingga hasil Perjanjian Renville, kabinet Amir runtuh. Setelah penanda tangan Perjanjian Renville, semua anggota kabinetnya (terdiri dari PNI dan Masyumi) mengundurkan diri, dan Amir sendiri mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya, dia berharap kabinet baru yang diilhami oleh Partai Komunis akan muncul dan menggantikannya. Ketika Sukarno mengangkat Hatta untuk memimpin "Kabinet Presiden" darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggung jawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, ia mengangkat anggota yang duduk di kabinet dari kalangan menengah, terutama PNI, Masyumi dan data non-partai. Amir dan kelompok sayap kirinya kini menjadi oposisi. Pada bulan Februari 1948, para pengikut Shahrir menganggap posisi ini sebagai oposisi, menekankan perpecahan mereka dari para pengikut Emir, dan mendirikan sebuah partai politik independen, Partai Sosialis Indonesia (PSI), sambil mendukung pemerintah Hatta.

Nyatanya, keruntuhan Amir datang lebih cepat daripada keruntuhan Sjahrir, dengan Amir langsung dituduh - lagi-lagi oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia - terlalu banyak berhubungan dengan keinginan pihak asing. Hanya empat hari setelah penandatanganan Perjanjian Renville, pada 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin dan seluruh pemerintahannya mengundurkan diri.

Pemerintahan baru dibentuk dan diumumkan pada tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri dan sekaligus melanjutkan sebagai Wakil Presiden.

Setelah negosiasi Lingar Jati, kini tampaknya solusi bagi Amir lebih sedikit daripada Sjahrir, dan lebih banyak kehinaan. Beberapa hari setelah Amir mengundurkan diri, pada awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya ke provinsi tersebut. Emil diharapkan menjelaskan kesepakatan Renville. Pada sebuah konferensi besar yang diadakan di kampung halaman Hatta, Bukit Tinggi di Sumatera Barat—tampaknya perhentian terpenting dalam perjalanan itu—Hatta berbicara tentang ketahanan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat. Kemudian Amir naik ke mimbar, seperti yang kemudian dijelaskan Hatta:

*"Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenangkannya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan".*

Menurut peserta lain, "Wajah Amir terlihat seperti orang yang sepele." Syafrir juga diundang ke konferensi Bukittinggi ini. Dia datang dari Singapura dan memberikan pidato. Menurut Leon Salim—seorang eksekutif Syafrir tua— "Syafrir juga terlihat lelah dan jarang tertawa." Dalam kata-kata saksi lain, "seolah-olah ada sesuatu yang membeku di wajah Syafrir," dan ketika gilirannya berbicara, "dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada Meldeca dan mundur." ". Hatta kemudian menulis singkat tentang pidato Syafrir: "Pidatonya pendek." Secara psikologis, penghinaan seperti itu sangat mungkin menjadi bara balas dendam yang menyulut pemberontakan terhadap Amir di kemudian hari. Perjanjian Renville tidak ada duanya dalam perundingan Linggadjati. Kedua belah pihak menuduh keduanya melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda memberlakukan blokade dengan maksud memaksa menyerah. Pada Juli 1948, Komisi Pelayanan Baik, yang mengawasi pelaksanaan perjanjian itu, menyatakan bahwa Indonesia telah berulang kali mengajukan gencatan senjata.

### C. Hasil Diplomasi

#### MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN RI

Setelah mendengar pembahasan Komisi Nasional Pusat tentang usul-usul sebelum pembentukan MPR dan DPR, selama ini kewenangan itu dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan Komisi Nasional, Komisi Nasional Pusat. ) dan operasional KNIP sehari-hari dilakukan oleh badan yang bertanggung jawab KNIP.

1. Mengingat krisis ini, kita membutuhkan organisasi yang bertanggung jawab atas nasib negara Indonesia, selain pemerintah.
2. Lebih lanjut mempertimbangkan bahwa usulan di atas didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan rakyat.

#### Keputusan

Sebaliknya, sebelum pembentukan KNIP, MPR dan DPR diberikan kekuasaan legislatif, ikut serta dalam pengambilan keputusan garis besar kebijakan negara, dan menyepakati bahwa operasi sehari-hari KNIP akan dilakukan karena mendesaknya situasi. Oleh badan kerja yang dipilih dari mereka dan bertanggung jawab atas KNIP.

Atas usulan KNIP, dalam sidangnya pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta, diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (dibaca: eks) Tanggal 16 Oktober 1945, yang dalam diktumnya berbunyi:

“Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahkan kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat”

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan

Indonesia, yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.<sup>1</sup>

Pemberitahuan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia

Deklarasi Wapres tentang Perubahan Kedudukan KNIP Sebagai Partai Politik. Pemerintah merekomendasikan pembentukan partai politik. Sehubungan dengan rekomendasi Pokja Komisi Nasional Pusat kepada Pemerintah, pihak-pihak tersebut adalah milik kita untuk menjaga dan mengamankan kemerdekaan agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikannya. perjuangan harus diperkuat, pemerintah menegaskan sikapnya yang diambil sesaat sebelumnya:

1. Pemerintah menyukai munculnya partai politik. Karena pihak-pihak tersebut dapat memimpin jalan yang tertib terhadap semua aliran pemahaman yang ada di masyarakat.
2. Pemerintah ingin agar partai politik telah diselenggarakan sebelum pemilihan anggota delegasi nasional pada bulan Januari 1946.

Para anggota BP-KNIP tercatat antara lain: Sutan Syahrir, Mohamad Natsir, Soepeno, Mr. Assaat Datuk Mudo, dr. Abdul Halim, , Soebadio Sastrosatomo, Soesilowati, Adam Malik, Soekarni, Sarmidi Mangunsarkoro, Nyoto dll.

#### **D. Segi Pedagogis**

##### 1) Kebebasan

Diplomasi adalah alat untuk mengangkat kepentingan nasional ke tingkat tertentu. Melalui diplomasi semacam ini, suatu negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, diperlukan solusi agar negara-negara tersebut dapat hidup dengan aman. Seperti yang dikatakan Reza Bayu Oktavian Arief S.IP, tujuan diplomasi semacam ini adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang berarti dapat menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat internasional. Untuk itu, perlu adanya olahraga atau tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk

menyampaikan pendapat mereka tentang resolusi konflik di negara-negara yang berkonflik. “Diplomasi membutuhkan peran serta faktor lain, seperti pemerintah. Tentu saja pemerintah berperan penting dalam diplomasi antarnegara.

## 2) Revolusi

Diplomasi telah dihapuskan oleh negara karena menurut sejarah yang ada diyakini terkait dengan negaranya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyatnya. “Dalam Perang Dunia I, beberapa aktor yang terlibat tidak dapat melakukan diplomasi sampai Perang Dunia II, ketika banyak aktor yang lebih besar terlibat. Secara umum, diplomasi harus dianggap sebagai agen. Dengan kata lain, diplomasi dapat dianggap sebagai mesin atau alat penggerak yang dapat menghubungkan dan berkomunikasi antar negara di seluruh dunia. Akhirnya, muncul forum yang memainkan peran diplomasi, yaitu peran penting dalam melakukan diplomasi antar negara saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah muncul,” jelas alumnus HI UGM ini lagi.

## 3) Kemandirian

Penulis menjelaskan ada 9 multi diplomasi yang biasanya digunakan oleh beberapa negara dalam melakukan diplomasi. Pertama, pemerintah berperan penting dalam melakukan negosiasi diplomatik antar negara karena pemerintah memiliki kekuasaan di negara tersebut. Kedua, lembaga swadaya masyarakat, karena terkadang partisipasi mereka lebih penting. Ketiga, suatu bisnis biasanya dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perdagangan, seperti jual beli. Itu dilakukan dengan negosiasi. Keempat, warga sipil bergerak sendiri untuk melakukan diplomasi, meskipun tidak berpartisipasi dalam forum tersebut.

Kelima, lanjutnya, sebagai peneliti, pusat penelitian ini juga memiliki peran untuk melakukan diplomasi. Misalnya, mereka memiliki tugas untuk memprediksi angka kemiskinan dan kecelakaan, yang tentunya sangat diperlukan. Keenam, ada banyak aktivis, sekarang aktivis yang telah memulai dan pergi ke Gerakan Perdamaian Dunia. Ketujuh, munculnya charity atau founding, yang bisa menjadi alat diplomasi. Karena, pada kenyataannya, semua negara, bahkan negara adidaya, membutuhkan bantuan dari negara lain. “Kedelapan, pemuka agama, pemuka agama juga memegang peranan penting dari segi diplomasi, karena ini bisa menjadi cara untuk menyelesaikan perselisihan agama, dan terakhir yang kesembilan. Komunikasi dan media

jangan remehkan hal ini. Media massa ini telah perang yang penting untuk membentuk opini publik. Karena tugas media itu sendiri adalah menginformasikan kepada masyarakat umum, maka organisasi itu contohnya adalah International Monetary Fund (IMF)," jelasnya.

#### 4) Kedaulatan

Tentu saja, diplomasi ini ada hubungannya dengan asosiasi internasional. Karena merupakan forum yang menyatukan negara untuk diplomasi dan komunikasi. "Tanpa asosiasi internasional, diplomasi tidak akan berjalan lancar. Salah satu Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, karena masih banyak negara yang berkonflik pada saat itu. Masalah sering muncul. Kemudian organisasi PBB lainnya muncul untuk menyelamatkan dunia. Kesimpulannya, benang merahnya jelas, yaitu Bumi di forum internasional resmi untuk siswa. Ini adalah alat untuk mengkomunikasikan pendapat terkait masalah. Setiap orang dapat memandu ide mereka untuk tujuan yang sama: "perdamaian dunia."